LAMPIRAN
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Nomor : W.14-14412.HN.04.03 Tahun 2024
Tanggal : 14 November 2024

SOP KONSULTASI HUKUM

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK NDONESIA **KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**	**NOMOR SOP**	: **W.14-14412.HN.04.03 Tahun 2024**
	TGL. PEMBUATAN	: **14 November 2024**
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: **KEPALA KANTOR WILAYAH**  **AGUNG REKTONO SETO** **NIP 197012021999031001**
	NAMA SOP	: **KONSULTASI HUKUM**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 61 Tahun 2024; 2. Peraturan Presiden RI Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;	1. Memiliki kemampuan komunikasi dialogis yang baik; 2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang baik; 3. Mengetahui mekanisme penyusunan laporan kegiatan.

KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
-	1. Jadwal piket layanan Konsultasi Hukum; 2. Lembar Konsultasi Hukum; 3. Komputer/laptop.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka layanan Konsultasi Hukum tidak berjalan dengan maksimal.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KONSULTASI HUKUM

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kadiv Yankumham	Kabid Hukum	Kasubid Luhbankum JDIH	JF Penyuluh Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kasubid Luhbankum JDIH menyusun jadwal piket layanan Konsultasi Hukum					SK Tim Konsultasi Hukum	1 hari kerja	Jadwal piket layanan Konsultasi Hukum	
2.	JF Penyuluh Hukum menerima dan memberikan layanan Konsultasi Hukum					ATK, laptop, formulir Konsultasi Hukum	90 menit	Masyarakat mendapatkan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapinya	
3.	Penyampaian secara berjenjang kepada Kadiv Yankumham apabila dari hasil Konsultasi Hukum memerlukan tindak lanjut tertentu					Data dukung terkait	1 hari kerja	Arahan Kadiv Yankumham	
4.	Menyusun laporan pelaksanaan Konsultasi Hukum					Data dukung	1 hari kerja	Laporan Konsultasi Hukum	
5.	Kasubid Luhbankum JDIH mengkompilasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Konsultasi Hukum secara berjenjang					Data dukung	5 hari kerja	Laporan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi	

